



**PAGE** PARTNERSHIP FOR ACTION  
ON GREEN ECONOMY

# KAJIAN PEMBELAJARAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA

Ringkasan Eksekutif



Empowered lives.  
Resilient nations.



United Nations Institute  
for Training and Research

## Hak Cipta © United Nations Institute for Training and Research, 2021, atas nama PAGE.

Ringkasan Eksekutif ini diterbitkan sebagai bagian dari Partnership for Action on Green Economy (PAGE) - sebuah inisiatif yang terdiri dari United Nations Environment Programme (UNEP), International Labour Organization (ILO), United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dan United Nations Institute for Training and Research (UNITAR).

Publikasi ini dapat direproduksi seluruhnya atau sebagian dan dalam bentuk apapun untuk tujuan pendidikan atau nirlaba tanpa izin khusus dari pemegang hak cipta, dengan syarat mencantumkan sumber. Sekretariat PAGE akan sangat menghargai untuk dapat menerima salinan dari setiap publikasi yang menggunakan publikasi ini sebagai sumbernya.

Publikasi ini tidak untuk dijual kembali atau untuk tujuan komersial apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari United Nations Institute for Training and Research.

### Citation

PAGE (2021), Green Economy Learning Assessment Indonesia: Executive Summary.

### Disclaimer

Publikasi ini dapat tersusun berkat dukungan dari mitra pendanaan PAGE. Isi publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PAGE dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah negara mana pun. Sebutan yang digunakan dan penyajian materi dalam publikasi ini tidak mengisyaratkan pendapat apa pun dari pihak mitra PAGE mengenai status hukum suatu negara, wilayah, kota, daerah atau otoritasnya, dan/atau mengenai garis perbatasannya. Selain itu, pandangan yang disampaikan tidak selalu mencerminkan keputusan atau kebijakan dari mitra PAGE, dan dikutipnya nama dagang atau proses komersial tertentu bukan merupakan bentuk promosi.

## Tentang GELA

Pada bulan Oktober 2017, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengintegrasikan aksi iklim ke dalam agenda pembangunan nasional dengan meluncurkan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK). PRK bertujuan untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dengan memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan negara. Hal ini dirancang untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat menjaga pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai target pembangunan tingkat sektor sembari memenuhi tujuan iklim Indonesia dan melestarikan sumber daya alam negara.

Pada Fase I PRK (2017-2019), yaitu tahap perencanaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) berhasil memperkenalkan alat perencanaan dinamika sistem yang memungkinkan untuk menilai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan berbagai skenario pembangunan. Kemudian pada tahun 2020, PRK telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2020-2024, yang disebut sebagai dokumen perencanaan hijau pertama di Indonesia, dengan strategi dan skenario yang jelas. Pada Fase II (implementasi) saat ini, BAPPENAS bekerja sama dengan Partnership for Action on Green Economy (PAGE) dan mitra pembangunan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan PRK pada tataran nasional maupun sub-nasional. Proses ini sekaligus menjadi basis informasi dalam pengembangan model, rencana strategis, serta target-target PRK baru untuk RPJMN berikutnya tahun 2025-2029.

Untuk mendukung implementasi PRK sebagai strategi transisi ekonomi hijau, PAGE melaksanakan Green Economy Learning Assessment (GELA) atau Kajian Pembelajaran Ekonomi Hijau untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembelajaran dalam rangka memajukan ekonomi hijau dan agenda perubahan iklim di Indonesia sesuai dengan Kerangka Implementasi PRK. Kajian berfokus pada kebutuhan pihak-pihak yang (akan) terlibat untuk melaksanakan PRK di tingkat nasional - termasuk para pembuat kebijakan dan perencana pembangunan yang bekerja di BAPPENAS, kementerian di tingkat pusat atau pemerintah daerah terkait, dan pemangku kepentingan utama lainnya. Kajian tersebut juga meninjau kapasitas kelembagaan organisasi akademik dan pelatihan di Indonesia saat ini dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran ekonomi hijau. Berdasarkan temuan ini, rencana aksi dan strategi pelatihan yang konkret dikembangkan untuk memperkuat dan meningkatkan pembelajaran ekonomi hijau di BAPPENAS dan lembaga terkait lainnya di tingkat nasional maupun daerah.

Green Economy Learning Assessment dilaksanakan dari bulan April hingga Desember 2020. Kegiatan ini merupakan sebuah proses dengan cakupan yang luas dan bersifat partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, universitas dan lembaga penelitian, sektor swasta, dan juga masyarakat lokal. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap kebijakan nasional yang relevan; survei online yang berhasil mengumpulkan 170 respon dari para ahli nasional; dua diskusi kelompok fokus (FGD) yang dihadiri hampir 300 peserta; 8 wawancara individu; serta tinjauan program dan inisiatif yang ada yang terkait dengan ekonomi

## Tiga Keluaran Utama dari GELA

Tinjauan program dan inisiatif pembelajaran terkait ekonomi hijau yang ditawarkan oleh kementerian, universitas, lembaga penelitian, dan organisasi nirlaba di Indonesia.

**Kerangka kompetensi** untuk masing-masing dari enam bidang tematik prioritas yang diidentifikasi dalam Kerangka PRK Fase II (kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri, limbah, dan karbon biru/bakau), dan pengarusutamaan PRK ke tingkat daerah, yang memungkinkan untuk dilakukan analisis terstruktur atas kebutuhan dan prioritas pembelajaran ekonomi hijau.

Sebuah **rencana aksi dan strategi** pelatihan yang berisi tindakan prioritas konkret untuk memajukan pembelajaran dan pengembangan kompetensi untuk penghijauan ekonomi Indonesia sejalan dengan Kerangka PRK Fase II.

hijau. Kajian tersebut juga dapat mendukung pengembangan dan implementasi inisiatif “B3-Rendah Karbon” (Build Back Better with Low Carbon Development) BAPPENAS, yang bertujuan untuk merancang paket stimulus hijau untuk pemulihan hijau jangka menengah hingga jangka panjang, mulai tahun 2022 dan seterusnya.

## Program dan Inisiatif Pembelajaran Ekonomi Hijau yang Ada

Inisiatif utama pembelajaran terkait ekonomi hijau di Indonesia adalah platform pelatihan “Pro-Green”, yang merupakan program pelatihan teknis untuk pejabat pemerintah tingkat tinggi dan pegawai negeri sipil lainnya. Platform tersebut dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) - sebuah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memberikan program pelatihan bagi aparatur sipil negara - bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI Indonesia), BAPPENAS, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diluncurkan pada 2019/2020, tujuan utama dari platform ini adalah untuk membangun kompetensi teknis yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan dan rencana yang akan mengarusutamakan strategi pertumbuhan hijau. Pelatihan “Pro-Green” telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan peluang pembelajaran ekonomi hijau bagi pejabat pemerintah, dan oleh karena itu juga menjadi pintu masuk utama untuk meningkatkannya di masa depan.

Meskipun berbagai lembaga pemerintah Indonesia tidak menyediakan program pelatihan khusus tentang ekonomi hijau, program yang ditawarkan oleh pusat pelatihan di sejumlah kementerian mencakup topik-topik yang terkait dengan ekonomi hijau. Sebagai contoh, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPK) memberikan pelatihan tentang isu-isu ekonomi seperti pajak hijau dan pembiayaan hijau. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain memberikan program pelatihan tentang isu-isu terkait lingkungan, juga memasukkan pembelajaran tentang keberlanjutan, serta konsumsi dan produksi. Di saat yang sama, diperkirakan lebih dari 100 program studi di perguruan tinggi dan lembaga pelatihan di Indonesia

secara aktif terlibat dalam isu lingkungan dan perubahan iklim, di mana seperempat di antaranya melaksanakan kegiatan pembelajaran terkait ekonomi hijau. Namun, sebagian besar program pembelajaran tersebut terintegrasi dengan program lain.

## Kerangka Kompetensi untuk Aksi Kebijakan Ekonomi Hijau

Sebagai tahap pertama untuk menentukan kebutuhan dan prioritas pembelajaran ekonomi hijau, kerangka kompetensi dikembangkan di bidang tematik/sektor prioritas PRK (termasuk pengarusutamaan PRK di tingkat daerah). Kerangka ini mengidentifikasi kepemimpinan nasional, manajemen, sosio-budaya dan kompetensi teknis yang diperlukan untuk memenuhi lima kebutuhan pembelajaran inti di bawah Kerangka PRK Fase II (implementasi): 1) memperkuat pengembangan kebijakan PRK, pemodelan dan perencanaan strategis, dan pengembangan kapasitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan internasional; 2) peningkatan kapasitas dalam kerangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan (Monitoring, Evaluating and Reporting atau MER) di tingkat nasional dan daerah; 3) mendorong keterlibatan sektor swasta; 4) meningkatkan komunikasi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran tentang PRK; dan 5) mengarusutamakan PRK ke dalam kebijakan dan model daerah.

### Kehutanan dan Lahan Gambut

Untuk memenuhi target implementasi PRK tentang tata kelola hutan, serta perlindungan dan pengelolaan lahan gambut, diperlukan berbagai kompetensi di lima bidang utama, meliputi moratorium, restorasi, pengelolaan berkelanjutan, produktivitas, dan hak atas tanah - terutama untuk mereka yang hidup dalam kemiskinan di sekitar hutan dan daerah lahan gambut.



## Pertanian

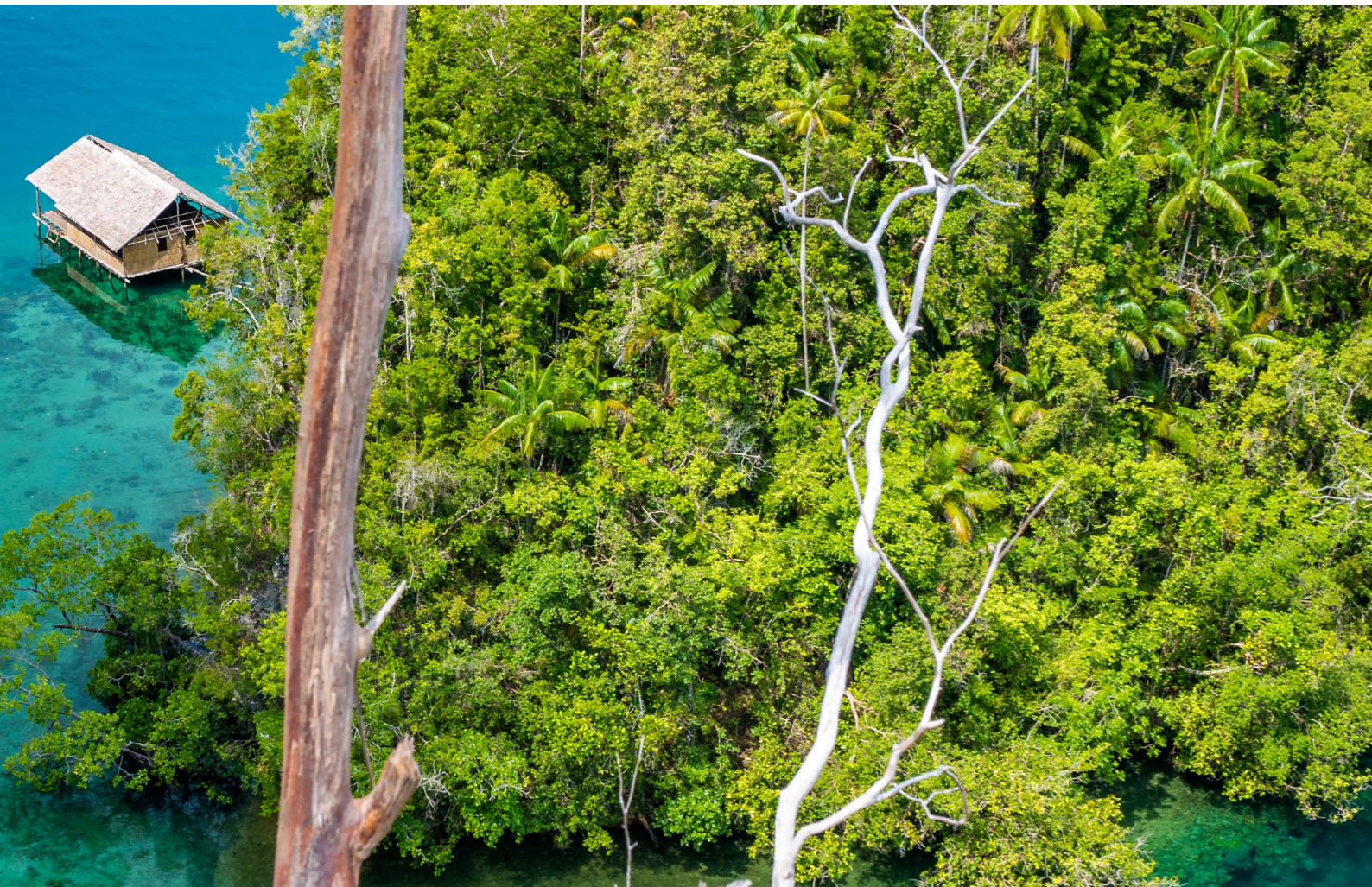
Kerangka PRK mengidentifikasi kebutuhan akan penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan dan peningkatan produktivitas sebagai bagian dari transformasi sistemik menuju sistem pertanian yang lebih beragam, efisien, dan bernilai lebih tinggi. Untuk mencapai transformasi ini, diperlukan pengembangan kompetensi dalam perencanaan tata ruang, peningkatan investasi di ekosistem kritis, dan tindakan untuk memperbaiki rantai nilai pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan.

## Energi

Kerangka kerja PRK mendorong untuk mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap melalui transisi ke energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, termasuk meningkatkan pangsa energi terbarukan Indonesia dari 8% pada 2015 menjadi 23% pada 2030. Hal ini membutuhkan pengembangan pengetahuan dan kesadaran atas biaya eksternal dari polusi, dan peluang yang dihadirkan oleh pengembangan teknologi energi hijau.

## Industri

NDC Indonesia berisi intervensi utama terkait industri untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca hingga 41% pada tahun 2030. Hal ini berfokus pada upaya peningkatan efisiensi industri dan pemulihan CO<sub>2</sub> di industri semen, petrokimia dan baja, seperti melalui penggunaan semen campuran dan mendorong Proses Industri dan Penggunaan Produk (Industrial Process and Product Uses atau IPPU) baru.



## Limbah

Kerangka kerja PRK mengidentifikasi sejumlah intervensi utama pengurangan limbah dan pengelolaan limbah yang dapat membantu negara untuk mencapai target di masa depan. Hal ini termasuk kebijakan untuk mengurangi timbulan limbah hingga 30% dan emisi terkait limbah industri hingga 50% pada tahun 2045. Intervensi lain bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan limbah dan pengelolaan limbah industri.

## Karbon Biru/Mangrove

Indonesia adalah rumah bagi ekosistem mangrove dan lamun (seagrass) terbesar di dunia. Namun, eksploitasi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan berdampak buruk pada masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada mangrove dan rumput laut, di mana rumah tangga tersebut rata-rata mengalami tingkat kemiskinan tertinggi kedua di Indonesia. Oleh karena itu, intervensi kebijakan PRK berfokus pada jalur pembangunan baru untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem laut dan pesisir.

## Mengarusutamakan PRK di Tingkat Daerah

Tujuan utama pelaksanaan PRK adalah pengarusutamaannya ke dalam rencana dan kebijakan pembangunan di tingkat daerah. Namun agenda politik pada tataran ini berbeda-beda antar provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, berbagai kompetensi sosial-budaya diperlukan untuk melibatkan dan membangun kepercayaan di antara para pelaku politik utama daerah.

## Kebutuhan dan Prioritas Pembelajaran

Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar topik atau mata pelajaran yang diidentifikasi dalam kerangka kompetensi telah diajarkan di berbagai bidang dan wilayah di Indonesia, khususnya untuk bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian, dan sampah. Mata pelajaran ini sering kali merupakan bagian dari kursus atau materi yang terintegrasi dengan program lainnya, dan tidak diajarkan secara khusus dalam konteks ekonomi hijau. Sementara itu, fokus program pelatihan terkait ekonomi hijau seringkali ditujukan untuk akademisi dan peneliti, dengan hanya sepertiganya yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil

negara dan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Program semacam itu juga sering kali disesuaikan dengan pengembangan kompetensi manajemen, dan difokuskan pada penyampaian pelatihan berbasis pengetahuan sehingga tidak dilakukan pembelajaran berbasis kompetensi dan keahlian teknis. Mengingat adanya kebutuhan keahlian untuk mengimplementasikan PRK, pengembangan kompetensi teknis harus menjadi prioritas pembelajaran utama di masa yang akan datang..

Kurangnya program pelatihan khusus ekonomi hijau menunjukkan perlunya kerangka kompetensi dan kurikulum khusus untuk menjadi basis informasi dalam mendesain kegiatan pembelajaran ekonomi hijau. Meningkatkan kompetensi pembuat kebijakan akan memerlukan penanganan kesenjangan pengetahuan dan kompetensi yang ada di semua lapisan ekonomi hijau. Pada tingkat penetapan agenda, pembuat kebijakan memerlukan pemahaman yang kuat tentang teori inti ekonomi hijau (misalnya ekonomi lingkungan) dan konsepnya (misalnya solusi berbasis alam), serta manfaat yang diberikan oleh transisi ekonomi hijau untuk mencapai kompetensi yang dibutuhkan oleh para pemimpin nasional. Selain itu, kompetensi manajemen dan sosial budaya membutuhkan pengetahuan tentang berbagai pendekatan yang dapat memberikan pengaruh pada transisi ekonomi hijau (misalnya efisiensi sumber daya), sementara kompetensi teknis lebih lanjut berusaha mendapatkan pemahaman praktis dan penerapan alat penilaian ekonomi hijau (misalnya cara penghitungan karbon, pemodelan dinamika sistem). Di tingkat organisasi, kegiatan pembelajaran ekonomi hijau juga diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan kompetensi yang terkait dengan pengembangankapasitas, pelibatan pemangku kepentingan, dan komunikasi publik. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan menuju pembangunan rendah karbon juga agar diprioritaskan di tingkat operasional.

## Tantangan dan Peluang

Sejumlah tantangan untuk meningkatkan peluang pembelajaran ekonomi hijau tetap ada. Hambatan kelembagaan terkait dengan terbatasnya anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, peraturan yang tidak fleksibel, kapasitas internal untuk penilaian dan pengembangan, dan kurangnya koherensi dan koordinasi antara lembaga pendidikan dan pelatihan masih ada. Sementara itu, ketiadaan kerangka kompetensi ekonomi hijau yang mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembelajaran juga membatasi kemampuan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kurikulum dan modul ekonomi hijau mereka sendiri. Hal ini juga menyebabkan kurangnya pelatih (trainers) yang berkualitas, di mana mereka yang menyampaikan kegiatan pembelajaran seringkali kurang memiliki keahlian khusus tentang topik ekonomi hijau. Masalah ini diperparah dengan program akreditasi Indonesia, di mana Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memberikan akreditasi kepada pusat pendidikan dan pelatihan. Sejauh ini, hanya 21% yang menerima pengakuan tersebut - yang berarti lebih dari tiga perempat lembaga pembelajaran di Indonesia memiliki akuntabilitas yang terbatas dalam hal penyampaian pembelajaran terkait ekonomi hijau.

Meningkatkan jumlah lembaga yang terakreditasi akan meningkatkan kapasitas dan kesiapan pusat-pusat tersebut untuk menawarkan pelatihan ekonomi hijau. Oleh karena itu, mengarusutamakan agenda perubahan iklim dan ekonomi hijau ke dalam proses akreditasi memberikan peluang kunci untuk meningkatkan pembelajaran ekonomi hijau di lebih dari 700 pusat pelatihan. Namun, langkah seperti itu akan membutuhkan dukungan tingkat tinggi dari pejabat pengelola LAN. Politisi memiliki pengaruh kuat terhadap arah yang diambil oleh lembaga pemerintah, dan terdapat kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan politik untuk agenda transisi di tingkat nasional dan daerah. Reformasi birokrasi di Indonesia saat ini difokuskan pada prinsip-prinsip good governance. Mempromosikan masalah pengaturan agenda yang berkaitan dengan transisi ekonomi hijau selanjutnya dapat memiliki efek trickle-down pada fokus pembelajaran lembaga pemerintah.

Terakhir, meskipun kegiatan peningkatan kapasitas terkadang dilakukan dengan bermitra dengan pihak luar, aktor non pemerintah, kegiatan ini sering kali menggunakan pendekatan jangka pendek berbasis proyek. Pendekatan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi untuk melibatkan mitra eksternal - termasuk mereka yang telah menetapkan program ekonomi hijau - dapat mengatasi defisit kapasitas internal dan meningkatkan pembelajaran ekonomi hijau di tingkat kelembagaan.

## Rencana Aksi Pembelajaran Ekonomi Hijau di Indonesia

Kajian ini mengidentifikasi sejumlah aksi spesifik yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah dan mitra lainnya dalam jangka pendek dan menengah, untuk membangun kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran ekonomi hijau di Indonesia.



- 1. Adaptasi proses kelembagaan.** Tindakan khusus termasuk mengembangkan templat untuk kesiapan akreditasi, meninjau peraturan internal untuk membuat kerangka kerja yang memungkinkan, memasukkan kegiatan pembelajaran ke dalam proses perencanaan anggaran, dan mengembangkan strategi nasional dan rencana aksi yang menyeluruh untuk memandu pembelajaran ekonomi hijau.
- 2. Membangun kesadaran dan kapasitas kepemimpinan.** Strategi ekonomi hijau jangka panjang dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka yang berada di posisi kepemimpinan (misalnya politisi tingkat tinggi) tentang isu transisi, untuk memastikan agar kapasitas dalam posisi kepemimpinan ini tidak terpengaruh oleh pergantian jabatan.
- 3. Meningkatkan kapasitas pelatihan.** Program train-the-trainer, termasuk dengan mitra eksternal, dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi hijau terhadap lebih dari 5.000 pelatih yang terdaftar di lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia..
- 4. Menciptakan akuntabilitas.** Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan ekonomi hijau reguler, serta kerangka kerja kompetensi dan kurikulum ekonomi hijau formal, akan menghasilkan akuntabilitas untuk pembelajaran ekonomi hijau di lembaga pemerintah.
- 5. Menggabungkan ekonomi hijau ke dalam sistem akreditasi.** Akreditasi merupakan pintu masuk strategis untuk mengukur pembelajaran ekonomi hijau di Indonesia. Dengan hanya 21% dari semua lembaga pendidikan dan pelatihan yang saat ini diakreditasi oleh LAN, mewajibkan lembaga untuk memasukkan pembelajaran ekonomi hijau sebagai bagian dari proses percepatan akreditasi dapat menjadi multiplier kunci untuk menciptakan peluang pembelajaran.
- 6. Mengarusutamakan pembelajaran ekonomi hijau ke dalam kebijakan, rencana, dan program reformasi.** Mempromosikan isu pengaturan agenda yang berkaitan dengan transisi ekonomi hijau sebagai bagian dari agenda reformasi dapat membantu menarik dukungan dari politisi tingkat tinggi, memperkuat upaya dalam rangka mengintegrasikan pembelajaran ekonomi hijau ke dalam program pendidikan dan pelatihan pemerintah.
- 7. Membangun kemitraan dengan organisasi eksternal.** Kemitraan dengan organisasi yang telah memberikan pelatihan ekonomi hijau akan bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di Indonesia. Mitra eksternal dapat memberikan dukungan keuangan dan teknis, termasuk melalui pertukaran pelatih, praktik terbaik bersama, dan penyampaian bersama program pelatihan.



**PAGE** PARTNERSHIP FOR ACTION  
ON GREEN ECONOMY

---

**GREEN ECONOMY LEARNING ASSESSMENT INDONESIA**